

# **'MENDAYUNG BERSAMA MENUJU PAPUA TANAH DAMAI'**

## **Rekomendasi KKP-SKP KC se-Papua**

### **PENGANTAR**

Sejak 25 – 30 November 2022, KKP-SKP KC se-Papua mengadakan rapat tahunan di Keuskupan Agats. Tema kegiatan ini adalah 'Mendayung Bersama Menuju Papua Tanah Damai'. Tema ini dipilih karena di satu sisi KKP-SKP KC se-Papua masih 'mendayung' sendiri-sendiri dalam usaha mewujudkan Papua Tanah Damai, di sisi lain visi Papua Tanah Damai masih menjadi fokus perhatian dan kerja-kerja KKP-SKP KC se-Papua. Visi Papua Tanah Damai sulit tercapai karena situasi Papua selama dua tahun terakhir semakin memburuk dan meluas terutama eskalasi kekerasan dan konflik bersenjata.

'Mendayung' sendiri-sendiri ditandai oleh lemahnya komunikasi intern KKP-SKP KC se-Papua dan tantangan Gereja Katolik Regio Papua dengan kompleksitas persoalan di setiap keuskupan. Dalam refleksi bersama, KKP-SKP KC se-Papua menyadari bahwa peran KKP-SKP KC se-Papua antara lain sebagai sumber informasi dan dokumentasi kepada para pimpinan dalam hal ini para uskup dan pimpinan ordo sangat minim. Biasanya sumber informasi dan dokumentasi ini menjadi bahan dan pegangan bagi para pimpinan dalam menyuarakan keberpihakan Gereja kepada orang-orang kecil (*option for the poor*).

### **REFLEKSI DAN REKOMENDASI**

Rapat tahunan selama beberapa hari ini mengangkat situasi umum Papua yang menjadi masalah dan tantangan yang dihadapi oleh Gereja Katolik.

#### **Masalah-masalah**

Berdasarkan sharing informasi setiap KKP-SKP KC se-Papua pada pertemuan ini, ada 7 masalah, yakni:

1. Konflik Bersenjata dan Pengungsi Internal (situasi perempuan dan anak, hak perumahan, kesehatan dan pendidikan)
2. Otonomi Khusus Jilid II, daerah otonomi baru, migrasi dan dampaknya terhadap marginalisasi orang asli Papua
3. Penangkapan sewenang-wenang, hak bebas berekspresi yang direpresi dan kriminalisasi orang asli Papua
4. Gencarnya islamisasi dan kriterisasi oleh Gereja-Gereja Pertobatan
5. Eksploitasi sumber daya alam dan investasi seperti kelapa sawit maupun tambang yang berdampak pada perampasan lahan/hak ulayat orang asli Papua, marginalisasi, deforestasi dan krisis iklim
6. Kerusakan alam dan hilangnya ruang hidup orang asli Papua
7. Kemandirian dan perekonomian umat basis terjepit oleh pelaku usaha yang memonopoli pasar

### **Tantangan-Tantangan:**

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) KKP-SKP KC se-Papua
2. Motivasi/semangat kerja KKP-SKP KC se-Papua semakin menurun
3. Petugas Pastoral yang tidak pro aktif terhadap masalah HAM di wilayah pastoralnya
4. Kurangnya animasi dan orientasi kepada calon dan petugas pastoral yang baru tentang situasi sosio-antropologi Papua
5. Pendokumentasian: minimnya Informasi/data
6. Belum tersalurnya informasi dengan baik kepada masyarakat atau umat basis (penyampaian informasi yang benar dan tepat) sehingga muncul krisis kepercayaan dari umat terhadap Gereja (petugas pastoral).
7. Kurangnya sinergitas antara KKP-SKP KC se-Papua dan komisi di Keuskupan
8. Kurangnya inisiatif untuk bekerja sama dengan mitra di tingkat nasional dan internasional
9. Kesulitan KKP-SKP KC se-Papua dalam hal pendanaan
10. Kurang tegasnya komitmen dan keberpihakan Gereja Katolik terhadap OAP

Terlepas dari masalah dan tantangan yang ada, KKP-SKP KC se-Papua tetap menyadari adanya harapan dan peluang untuk mewujudkan visi Papua Tanah Damai. Peluang tersebut antara lain:

1. KKP-SKP KC masih menjadi unit karya pastoral yang dipercaya baik oleh internal Gereja Katolik maupun pihak-pihak lainnya.
2. Para uskup dan pimpinan ordo menjadi animator utama KPKC dengan tetap mendukung kerja-kerja KKP-SKP KC se-Papua.
3. KKP-SKP KC se-Papua memiliki sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang mendukung kerja-kerja animasi, dokumentasi, dan advokasi.
4. KKP-SKP KC se-Papua mempunyai mitra kerja di tingkat lokal, nasional maupun internasional yang mempunyai perhatian dan kehendak baik bagi Papua Tanah Damai.
5. Kolaborasi antara data dan dokumentasi KKP-SKP KC se-Papua dengan perkembangan teknologi dan media informasi cetak dan online maupun media sosial memudahkan penyebaran visi-misi maupun keberpihakan Gereja Katolik terhadap orang asli Papua yang sedang menderita.

Oleh karena itu, bertolak dari refleksi, masalah, tantangan maupun peluang yang ada, KKP-SKP KC se-Papua merekomendasikan beberapa hal berikut.

### **Intern KKP-SKP KC se-Papua**

1. KKP-SKP KC se-Papua menyadari bahwa sumber daya manusia/tenaga belum memadai. Hal ini disebabkan oleh sumber daya manusia yang ada tidak optimal dan tidak efektif dalam bekerja. Oleh karena itu diperlukan kedisiplinan dalam kerja yang berpatokan pada program kerja tahunan dan evaluasi yang jelas.
2. KKP-SKP KC se-Papua tetap memerlukan pelatihan (pengembangan diri), untuk menambah pengetahuan dan kemampuan. Selain itu tetap dibutuhkan rekrutmen jika diperlukan tenaga-tenaga khusus.
3. Lebih jauh, KKP-SKP KC se-Papua menilai pentingnya kaderisasi sumber daya manusia maupun penyegaran dengan mempertimbangkan kejenuhan dan durasi kerja.
4. Membangun komunikasi dan kerja sama yang intensif dengan mitra kerja di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
5. KKP-SKP KC se-Papua perlu secara rutin dan konsisten untuk *sharing* informasi tentang situasi HAM di Papua tidak hanya kepada para uskup dan pimpinan ordo tetapi juga

- kepada para petugas pastoral dan umat dalam kerja sama dengan komisi-komisi yang ada di setiap keuskupan sekaligus mendengarkan *feedback* untuk ditindaklanjuti.
6. Menerbitkan *newsletter* bulanan sebagai salah satu media sharing informasi.


### **Para Uskup dan Pimpinan Ordo**

1. Belum tersalurnya informasi yang valid dan kredibel dengan baik kepada masyarakat atau umat basis berkaitan dengan keberpihakan Gereja Katolik terhadap persoalan HAM di Papua sehingga muncul krisis kepercayaan dari umat terhadap Gereja (petugas pastoral). KKP-SKP KC se-Papua dapat menjadi saluran informasi tersebut dalam kerja sama dengan komisi-komisi di Keuskupan.
2. Diperlukan usaha untuk mengubah cara pandang terutama para petugas pastoral dan umat akan KPKC sebagai nilai-nilai kristiani yang mesti menjadi praksis hidup semua orang sehingga tidak menyempitkannya semata sebagai tugas dan tanggung jawab KKP-SKP KC se-Papua.
3. Menyikapi point dua, KKP-SKP KC se-Papua bersedia membantu para uskup dan pimpinan ordo untuk memberikan animasi kepada petugas pastoral dan umat di semua tingkatan wilayah pelayanan pastoral tentang pentingnya nilai-nilai KPKC dalam kaitan dengan situasi HAM Papua.
4. KKP-SKP KC se-Papua mengharapkan pastoral kehadiran oleh para uskup di wilayah konflik, selain seruan pastoral melalui surat gembala.
5. Data dan informasi dari Gereja Katolik (KKP-SKP KC se-Papua) diharapkan tidak hanya bersifat informatif tetapi juga digunakan untuk mendorong perubahan kebijakan pemerintah.

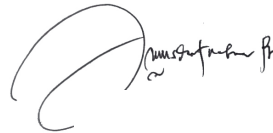
### **PENUTUP**

Gereja dipanggil untuk menjaga dan memelihara kesatuan umat tanpa melupakan keberpihakan kepada yang kecil dan menderita (*option for the poor*). KKP-SKP KC se-Papua hadir sebagai perpanjangan tangan para uskup dan pimpinan ordo dalam bidang Sosial Pastoral. Oleh karena itu efektivitas kerja KKP-SKPK KC se-Papua juga tidak terlepas dari dukungan para uskup dan pimpinan ordo serta sinergitas dengan komisi-komisi yang ada di setiap keuskupan maupun sikap proaktif petugas pastoral dan umat basis.


Agats, 29 November 2022  
Salam dan Hormat Kami



Yuliana Langowuyo  
Direktur SKPKC Fransiskan Papua



RD Linus Dumatubun  
Direktur SKP Keuskupan Agats



Saul Wanimbo  
Ketua SKP Keuskupan Timika



RP Bernardus Baru, OSA  
Direktur SKPKC OSA Christus Totus Papua



RD Yohanes Kandam  
Ketua KKP Keuskupan Agung Merauke



RD Izaak Bame  
Ketua SKP Keuskupan Manokwari Sorong